TAJUK RENCANA

Antisipasi Merebaknya Anthrax

ANTHRAX kembali menyerang Gunungkidul dan menyebabkan 3 orang meninggal, yakni warga Kapanewon Semanu. Kasus tersebut sebenarnya muncul sejak Mei hingga Juni 2023, atau sebelum Idul Adha. Ketiga korban sebelumnya dirawat di RSUP Sardjito dengan diagnosa suspect anthrax dan meninggal sebelum dinyatakan positif oleh RSUP Sardjito. Dua orang diketahui mengonsumsi daging sapi sebelum sakit.

Ternyata kasusnya tak hanya itu, karena saat ini 85 orang warga Padukuhan Jati Kalurahan Candirejo Semanu diduga terjangkit penyakit anthrax melalui proses zoonosis penularan penyakit dari sapi ke manusia. Mereka dinyatakan positif tertular anthrax, satu di antaranya meninggal dunia. Kasus ini berawal dari penyembelihan hewan Juni lalu atau beberapa hari sebelum Idul Adha (KR 5/7).

Kita tentu tak boleh menganggap enteng kasus ini, apalagi mengakibatkan orang meninggal. Mengapa ini bisa terjadi ? Apakah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul kecolongan ? Inilah yang harus diselidiki. Apalagi, sebelum hewan disembelih terlebih dulu harus ada surat keterangan bahwa hewan tersebut benar-benar sehat sehingga layak dikonsumsi.

Melihat penularan itu secara zoonosis, yakni dari sapi ke manusia, berarti hewan tersebut ketika disembelih tidak dalam keadaan sehat, kemudian dagingnya dikonsumsi manusia hingga berakibat tertular penyakit.

Kita memang tak perlu panik menghadapi situasi demikian, tapi bukan berarti tidak waspada. Sebab, kalau tata laksana penyembelihan hewan ternak tidak diperbaiki, dan tidak ada pengawasan yang ketat terhadap hewan ternak, dikhawatirkan penyebaran anthrax terus terjadi. Bahkan, bila tidak ada pengawasan distribusi daging, bisa saja menyebar ke luar Gunungkidul.

Langkah pertama yang mestinya dilakukan adalah melokalisir peredaran daging yang diduga telah terkontaminasi Anthrax, jangan sampai beredar luas. Selanjutnya, mereka yang diduga suspect anthrax terus dipantau kesehatannya dan kalau perlu dikarantina hingga benar-benar sembuh. Pendataan suspect anthrax sangatlah penting guna menentukan langkah pengobatan yang tepat. Jangan sampai ada korban jatuh lagi.

Mengingat lokasinya di Gunungkidul, kita berharap ada langkah cepat dari Dinas setempat untuk mencegah jangan sampai Anthrax menyebar ke luar. Hewan yang telah terdeteksi sakit, tak boleh lagi diperjualbelikan. Kalau perlu, pemerintah setempat memberi semacam subsidi atau kompensasi ganti rugi kepada peternak yang sapinya sakit, agar mereka tidak menjualnya. Sebab, umumnya peternak tak mau rugi dan menjual sapinya meski dalam kondisi sakit.

Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengendalikan Anthrax tentu sangat ditunggu-tunggu. Jangan sampai isu anthrax ini justru berkembang liar dan merugikan peternak secara keseluruhan. Langkah edukasi dan sosialisasi kepada peternak harus terus dilakukan agar mereka paham bagaimana merawat hewan ternak supaya tidak terkena penyakit. ❑-d

Pesantren Lansia, Sebuah Alternatif

Fahmi Amhar

HAMPIR 30 juta warga Indonesia di atas 60 tahun! Hari ini kita tidak hanya mendapat bonus demografi, namun juga bonus populasi lansia. Ini jumlah terbesar lansia sejak Indonesia merdeka. Bisa dipahami. Ketika kesejahteraan umum suatu negeri telah membaik dan layanan kesehatan makin bermutu, maka angka harapan hidup niscaya meningkat. Namun ini juga membuat populasi lansia membesar. Di negara-negara maju seperti Jepang atau Austria, fenomena ini terjadi sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Di sana ditambah dengan menurunnya minat orang berkeluarga dan punya anak. Orang akhirnya cemas, suatu saat ras mereka bisa punah.

Kaum lansia di negara-negara maju tersebut mengalami hal yang sama, yaitu kesepian! Di Austria berkembang profesi baru untuk mahasiswa, yaitu menemani lansia. Tugasnya sederhana, seminggu tiga kali menemani lansia sarapan sambil ngobrol dua jam. Sesekali boleh menemani jalan-jalan, belanja atau berkunjung ke dokter. Di Jepang ada nenek yang karena kesepian, akhirnya nekad mencuri barang receh di supermarket agar dipenjara. Dia lebih bahagia dalam penjara. Makanan terjamin, banyak kesibukan dan teman ngobrol.

Visi Besar

Berdasarkan data terbaru, angka harapan hidup di Indonesia adalah sekitar 71 tahun untuk laki-laki dan 75 tahun untuk perempuan. Jika umumnya orang memutuskan pensiun kerja di usia 56-60, maka rata-rata masih ada masa hingga 19 tahun untuk diisi. Dengan sesuatu yang bermanfaat. Setidaknya bagi lansia yang bersangkutan, sampai dia lebih siap untuk husnul khatimah.

Kalau tidak memiliki visi besar buat masyarakat, maka obrolan lansia tinggal sekitar cucu bila ada, dan kesehatan diri yang mulai pudar. Ini problema di negara-negara maju, yang tidak akan terjawab meski oleh teknologi dalam Revolusi Industri 4.0. Problema ini hanya akan terjawab oleh agama. Dalam Islam ada syariat tentang *tarbiyatul aulad, birrul walidain* dan silaturahim.

KR-JOKO SANTOSO

Hal-hal yang semestinya pernah dipelajari sewaktu muda, namun tetap dapat dipelajari lagi di semacam pesantren untuk lansia.

Namun sudah ada berapa pesantren lansia? Di beberapa kota sudah ada dengan berbagai istilah dan model. Di Yogyakarta ada madrasah lansia alias *senior school* milik Aisyiah, yang juga memiliki Daycare Lansia. Sekolahnya tiga kali seminggu. Ada yang *boarding*, ada juga yang pergi-pulang. Di tempat lain ada juga pesantren lansia yang temporer, semisal hanya di bulan Ramadhan.

Berbeda dengan sekolah untuk anak usia sekolah, pesantren lansia ini tidak memiliki batas waktu kelulusan. Ini adalah model yang lebih humanis dari Panti Jompo di masa lalu. Sebuah tempat yang kadang disalahmengerti sebagai tempat pembuangan lansia. Padahal sejatinya memang tidak selalu mudah bagi lansia untuk hidup bersama anak-anak yang sibuk bekerja. Salah-salah malah dititipi cucu. Itu juga kalau mereka memiliki anak atau cucu.

Satu SMA

Ada cerita semi romantis. Seorang kakek usia 84 tahun menikah lagi dengan nenek usia 82 tahun. Dulu mereka satu SMA. Sang kakek semula lama hidup di Eropa. Setelah tua ingin menutup mata di Indonesia. Sang kakek masih agak lebih kuat dibanding istrinya. Anak-anak si nenek senang melihat ibunya terawat, jadi mereka sayang dengan bapak tirinya. Anak-anak sang kakek melihat bapaknya di Indonesia disayang anak tirinya jadi tenang dan merelakan bapaknya di Indonesia.

Namun yang seperti ini tentu jarang. Pesantren Lansia dapat menjadi alternatif solusi. Dan peluang investasi menarik yang menyasar kalangan atas yang ingin kualitas hidup orang tuanya lebih baik. ❑-d

*) ***Prof Dr Ing Fahmi Amhar,***
Anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sutaryono

KAJIAN Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) saat ini menjadi suatu yang *urgent* sekaligus *emergence*. Mengapa? Karena dalam satu dekade terakhir pemerintah telah melakukan berbagai terobosan guna memberikan akselerasi dan kemudahan dalam berusaha dan berivestasi. Apalagi setelah Perppu 2/2022 dan terakhir dikuatkan melalui UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Namun demikian, kemudahan berusaha dan investasi bukan berarti menafikan dampak lingkungan yang ditimbulkan maupun mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Argumen inilah yang menempatkan KLHS sebagai hal *urgent* sekaligus *emergence*. Dalam hal ini KLHS dimaknai sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi: (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pengarusutamaan KLHS

Sejak terbitnya UU 32/2009 yang mengamanahkan kewajiban KLHS, hingga saat ini masih ada kecenderungan menempatkan dokumen KLHS hanya sebatas formalitas dan kewajiban normatif saja. Kecenderungan ini berdampak pada rendahnya kualitas KLHS dan terabaikannya rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Disisi yang lain, pemerintah memfasilitasi kemudahan berusaha dan investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha dalam bentuk *Online Single Submission* (OSS). OSS ini dilakukan untuk: (a) mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha; dan (b) memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time* (Opini KR, 21/1/2019).

Dalam konteks perizinan berusaha terkait pemanfaatan ruang, telah diterapkan kebijakan OSS KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Disamping berperan sebagai perizinan dalam pemanfaatan ruang, KKPR juga berperan sebagai dasar untuk memperoleh tanah bagi pelaku usaha (Opini KR, 08-11-2022). Dalam hal ini RDTR menjadi *single reference* dalam perizinan pemanfaatan ruang. Disisi lain legalitas RDTR saat ini tidak lagi dalam bentuk peraturan daerah tetapi peraturan kepala daerah, ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan penetapannya cenderung lembih sempit. Untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana dan/atau program yang ada dalam RDTR tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, tidak memberikan dampak lingkungan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka penyusunan RDTR harus terintegrasi dengan KLHS.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pengarusutamaan KLHS, baik dalam penyusunan rencana tata ruang, RPJP, RPJM maupun kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup perlu diprioritaskan. Caranya, melalui: (1) penguatan pemahaman pentingnya KLHS bagi semua pemangku kepentingan; (2) memastikan setiap penyusunan rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi dengan KLHS; (3) pokja penyusun KLHS dan tim penyusun rencana tata ruang ditetapkan melalui satu surat keputusan; dan (4) mengalokasikan anggaran secara memadai dalam penyusunan KLHS. Apabila beberapa hal ini bisa dilakukan, maka keberlanjutan lingkungan akan terus terjaga dan berdampingan dengan pembangunan wilayah yang terus berkembang. ❑-d

*) ***Dr Sutaryono**, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Tim Ahli Validasi KLHS DIY*

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Penebangan dan Pencerabutan Pohon Jl Gito-gati

SEKITAR sebulan tidak melewati Jalan Gito-gati. Ketika kemarin lewat kawasan tersebut merasa kaget. Suasana rindang yang biasanya tidak muncul lagi. Bahkan pepohonan yang merindangi kawasan tersebut sudah hilang.

Ternyata pepohonan di kiri kanan jalan, sudah ditebang tanpa sisa. Bahkan juga tampak bila pohon-pohon tersebut tidak sekadar ditebang namun juga diangkat dan tercerabut hingga seakar-akarnya. Mengapa pohon-pohon besar yang merindangan kawasan itu ditebangi? Apakah mau diganti tanaman yang lebih produktif atau bagaimana. Tetapi bila mau diganti mengapa tanaman barunya tidak ditanam dan dibiarkan agak besar baru pohon lama ditebang?

Tanpa pohon perindang, rasanya miris melihat kawasan yang semakin ramai sebagai salah satu jalan alternatif tersebut. Pasti akan sangat panas dan meranggas. ❑-d

*) ***GA Purwanto AMd,***
Karangasem Condongcatur

TPS Sementara di Pinggir Jalan Raya

SAMPAH selalu menjadi masalah. Dan tempat penimbunan sementara (TPS) di pinggir jalan raya memang menjadi masalah juga. Karena bila sampah belum diambil, tumpukan plastic berisi sampah menjadi pemandangan yang kotor kadangkala menjijikkan. Apalagi bila menguarkan bau tidak sedap.

Namun hal itu menjadi pemandangan di banyak tempat di Kota Yogya. Karena pembuatan bak penampungan sampah sementara tidak jarang terdapat di pinggir jalan besar. Namun ketika sampah belum diambil dan sampah melimpah hingga ke luar bak, memang tidak bisa dihindarkan pemandangan yang tidak indah. ❑-d

*) ***Afifah,*** *Jl Kaliurang Km 5 Yogya*

Pojok KR

14 WNI korban perdagangan organ tubuh.
-- Lagi-lagi karena lemahnya pengawasan.

***

Suspect anthrax, 3 warga Gunungkidul meninggal.
-- Bisa menyebar kalau tak diantisipasi.

***

Pemilih belum E-KTP tetap bisa gunakan hak pilih.
- Hak memilih itu melekat pada orang.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.